



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 06 Mei 2020

Halaman: 5

Temukan 4.000 Data Penerima Ganda

Pemkot Masih Belum Tentukan Nominal Bansos

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih menyisir data penerima bantuan sosial (bansos). Pencermatan tersebut perlu dilakukan agar tidak ada penerima bantuan ganda.

Pemkot Yogyakarta sebelumnya mencatat ada sekitar 53.319 kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan sosial. Artinya ada 38,8 persen KK di Kota Yogyakarta mendapat bantuan. Namun demikian data tersebut masih belum klar.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan untuk pencermatan data tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini lantaran ada data pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

"Saat ini kami sedang mencermati jaring pengaman sosial. Karena ada aturan yang sudah dapat (bansos) tidak boleh mendapat bantuan lagi. Kami harus mencocokkan data dari pusat, provinsi, juga," katanya (5/5).

Ia menerangkan, pihaknya telah mencoba menggabungkan dua data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos RI dan Keluarga Sasaran Jaring Pengaman Sosial (KSJPS) milik Pemkot Yogyakarta.

Dari penggabungan data tersebut, diketahui ada sekitar 4.000an data yang sama. Artinya keluarga tersebut termasuk dalam DTKS dan KSJPS. Hal itu pula yang membuat Pemkot Yogyakarta perlu menyisir kembali data yang ada.

"Kami masih kejar (penyisiran data) karena ada perbedaan. Kalau KSJPS itu adalah data per KK, sementara DTKS adalah data penerima bantuan. Penerima bantuan ini bisa jadi anak, istri, jadi bisa satu keluarga mendapat dua bantuan, kan tidak boleh," terangnya.

Prinsipnya Pemkot tidak akan *ngutek-utek* (mengubah) data milik Kemensos atau provinsi. Yang tercover APBD (Kota Yogyakarta) yang perlu dicermati," sambungnya.

Belum dipastikan
Belum adanya kepastian data, maka Pemkot Yogyakarta masih belum bisa memastikan berapa anggaran untuk bansos. Namun demikian, Heroe berharap minggu depan sudah ada kejelasan, dan segera disalurkan.

"Anggaran sudah ada, tetapi kan berapa jumlahnya belum tahu, karena jumlah penerimanya belum pasti," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yusrantana, menyebut sinkronisasi data bagi keluarga penerima manfaat (KPM) pendataan itu terus dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial. Ia menyebut, supaya pembagian merata, tiap Kepala Keluarga (KK) hanya akan mendapat bantuan Rp600 ribu dalam bentuk sembako. Penerataannya pun menurutnya memakan waktu lama.

Jika satu keluarga yang sudah terdapat di DTKS dengan jenis program BLT atau Program Keluarga Harapan (PKH). Maka penerima bantuan tersebut harus memilih bantuan lain untuk menggenapi hingga mencapai besaran Rp600 ribu. (maw/bda)

DISISIR

- Pemkot Yogyakarta masih menyisir data penerima bantuan sosial (bansos) agar tidak ada penerima bantuan ganda.
- Data sementara ada sekitar 53.319 kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan sosial. Atau, 38,8 persen KK di Kota Yogyakarta mendapat bantuan.
- Pemkot sempat menggabungkan dua data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos RI dan Keluarga Sasaran Jaring Pengaman Sosial (KSJPS).
- Dari penggabungan data tersebut, diketahui ada sekitar 4.000an data yang sama.
- Data penerima bansos yang belum final membuat Pemkot belum bisa memastikan berapa anggaran untuk bansos.

Tindak Lanjut

Ditanggapi
Diketahui
Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005